

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TAHUN 2022

**Jl. R.E. Martadinata No. 9 Benteng
Kab. Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan
Email : dishubkepselayar@gmail.com**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	8
D. Isu-Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Indikator Kinerja Utama.....	17
C. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	18
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Pengukuran Kinerja	33
B. Analisis Capaian Kinerja	50
C. Realisasi Keuangan	69
BAB IV PENUTUP	76

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

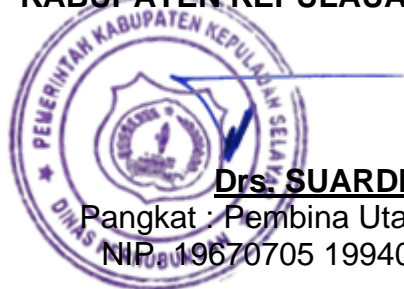
Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izinNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2022 kepada Bupati Kepulauan Selayar dan terutama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Ucapan terima kasih tak lupa kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyediaannya, olehnya itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif untuk perbaikan penyusunan LKjIP di tahun-tahun yang akan datang.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



Drs. SUARDI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670705 199403 1 020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good govermance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas akuntabilitas, azas efisiensi, azas efektifitas dan azas keadilan. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil, selain itu penyusunan LKjIP ini berdsarkan pula pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*).

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud penyusunan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah :

- a. Sebagai laporan atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja yang telah dipertanggungjawabkan dan seharusnya dicapai; dan
- b. Sebagai bahan pertimbangan pada perencanaan tahun yang akan datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.

C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

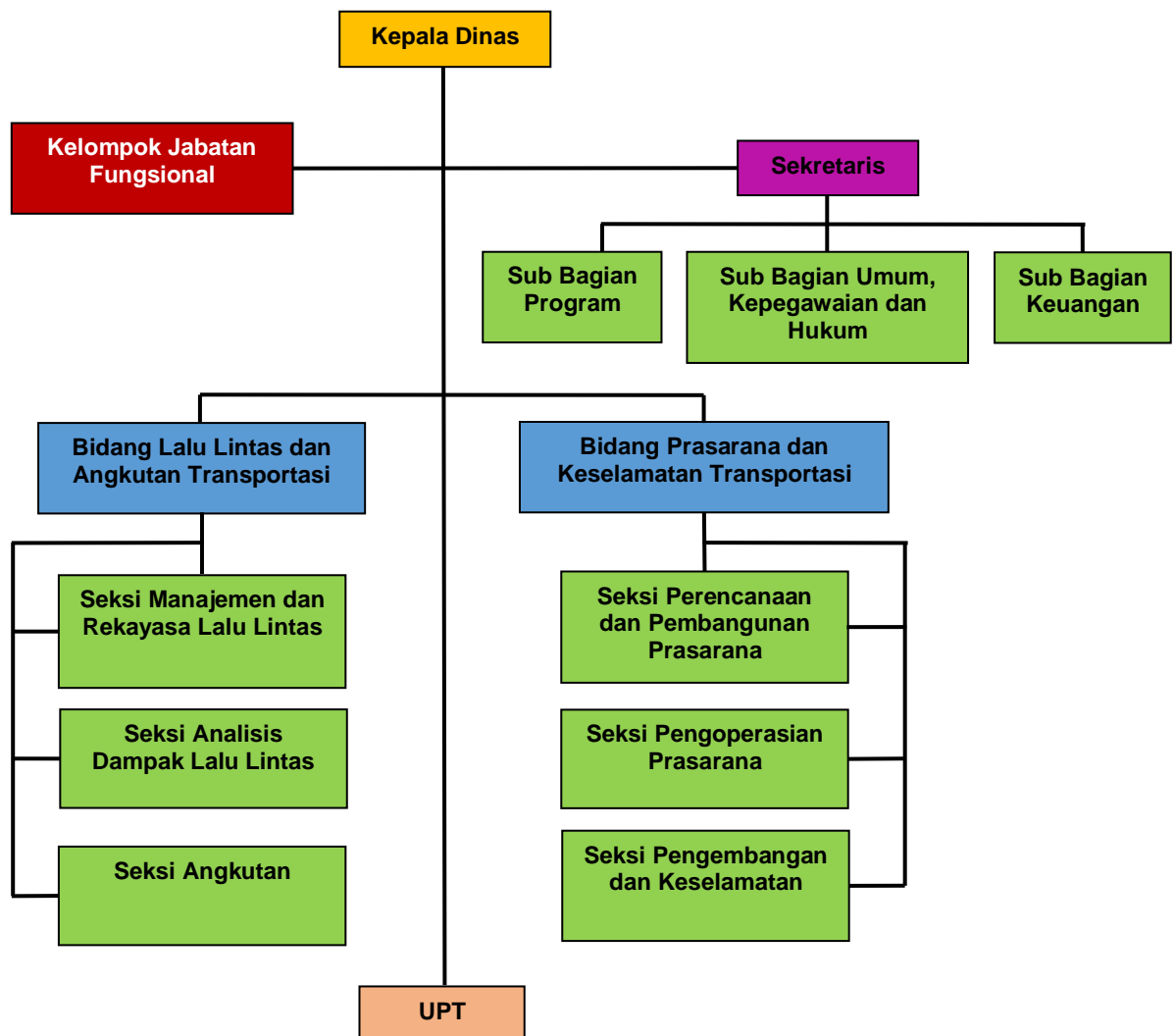
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Angkutan.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Keselamatan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;

- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
(Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020)

D. Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap visi misi Bupati – Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW dan KLHS diketahui permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

- a. Tata Kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal.
- b. Pelayanan satu pintu penertiban Izin perhubungan belum berjalan maksimal.
- c. Masih kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk menguji kelayakan kendaraannya.
- d. Belum adanya studi beberapa Pelabuhan laut yang diusulkan akan dibangun.
- e. Masih minimnya keberadaan rambu-rambu perlengkapan jalan.
- f. Belum tersedianya alat uji kendaraan bermotor.

Sedangkan Faktor Penghambat, yaitu :

- a. Keterbatasan atau kurangnya ketersediaan alokasi dana APBD;
- b. Masih banyaknya usulan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan yang belum atau tidak terakomodir dalam penetapan APBD, APBD Provinsi, dan APBN;
- c. Belum optimalnya pengelolaan data bidang perhubungan;
- d. Masih belum tercapainya pelayanan sesuai target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Masih kurangnya pelayanan manajemen angkutan umum.

Maka isu-isu strategis yang terkait adalah :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan keselamatan

jalan;

- b. Peningkatan sarana dan prasarana Keselamatan Pelayaran;
- c. Pengadaan sarana Alat Uji Kendaraan;
- d. Peningkatan pemerataan aksesibilitas pelayanan transportasi;
- e. Peningkatan pergerakan penumpang dan barang dari daratan ke kepulauan dan sebaliknya;
- f. Peremajaan angkutan desa;
- g. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji, dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan / balai uji.
- h. Pengadaan sistem informasi transportasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi rencana pembangunan daerah pada RPJMD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut :

Visi	Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi I	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi Informasi yang Baik	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Hasil	Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	
Misi III	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
Mewujudkan Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang Terpadu	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Meningkatkan AksesibilitasPelayanan Transportasi	Peningkatan Kualitas LayananTransportasi
			Peningkatan Sarana dan PrasaranaTransportasi
			Peningkatan Koordinasi Stakeholder
Misi IV	Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antar Wilayah	Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Pelabuhan, Jangkauan Hub-hub melalui Kerjasama Antar Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Jasa Perhubungan dan Transportasi
			Peningkatan Infrastruktur Kepelabuhanan
			Peningkatan Koordinasi Stakeholder
			Pembangunan Simpul-simpul Transportasi

Sebagaimana digambarkan pada Visi, Misi, Program Bupati/Wakil Bupati terpilih, Program Prioritas Kabupaten

Kepulauan Selayar yaitu Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim.

Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
dan
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Program Pendukung yaitu :

Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan pada Tabel 5.1 diatas, peran Dinas Perhubungan dalam mendukung Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan dari segi transportasi menjadi sangat penting antara lain :

1. Dalam mendukung pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), Pemindahan barang dari pemasok ke konsumen juga dilakukan dengan cepat oleh transportasi, proses pendistribusian barang dari pemasok ke konsumen tersebar luas secara lintas ruang dan waktu. Aliran barang dari distributor ke konsumen sangat mempengaruhi besarnya biaya logistik. Dinas Perhubungan memiliki peranan dalam aktivitas transportasi melalui penyediaan infrastruktur yang diperlukan, seperti pembukaan rute/trayek angkutan darat menuju kawasan PDL, pembangunan shuttle halte dalam kawasan PDL dan pengadaan lampu jalan dalam kawasan PDL yang dimasukkan dalam Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Dinas Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan mendukung dan memaksimalkan perannya terhadap pengembangan aksesibilitas transportasi pada spot-spot destinasi wisata. Pembangunan infrastruktur yang dapat mempermudah konektivitas daerah satu dengan lainnya terutama pulau-pulau yang memiliki obyek wisata unggulan. Program Dinas Perhubungan dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata antara lain pembangunan

tambatan perahu, penerangan LPJU dalam kawasan wisata, dan mendukung untuk memfasilitasi penertiban izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter guna menunjang investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar yang cukup besar.

3. Dari segi dukungan terhadap Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT), Dinas Perhubungan memiliki peran dalam pendukung sub-sub sentra KIPT dengan pembangunan infrastruktur kepelabuhanan dan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (LPJU).
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbangsari) adalah program unggulan sebagai penguat atau penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Gerbangsari adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan. Dinas Perhubungan dalam mendukung program Gerbangsari mempunyai peran dalam pembangunan tambatan perahu dan pengadaan LPJU di desa-desa guna mendukung perekonomian perdesaan.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan “kepulauan” yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah tersebut serta menjamin pemerataan maupun perpindahan barang maupun penduduk, transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah perdesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah perdesaan.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mendukung PDL, KEK, KIPT, dan Gerbang Sari

Dinas Perhubungan berperan dalam membangun dan meningkatkan akses ke kawasan tersebut. Pengembangan bidang perhubungan dengan adanya perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya wilayah kepulauan serta arus lalu lintas barang dan penumpang sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah perjalanan masyarakat termasuk perjalanan wisata, meningkatkan moda transportasi umum dan arus logistik barang, peningkatan PAD dan menjaga kestabilan harga barang dan disparitas harga. Adapun rencana pengembangan antara lain :

- a. Revitalisasi, rehabilitasi dan penambahan panjang tambatan perahu yang diprioritaskan pada kawasan pariwisata, pusat distribusi logistik, kawasan industri perikanan terpadu, dan desa-desa untuk mendukung program Gerbang Sari;
- b. Pembangunan dermaga penyeberangan;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana jalan pada kawasan pariwisata, pusat distribusi logistik, kawasan industri perikanan terpadu, dan desa-desa wisata.

Normalisasi Tambatan Perahu di Daerah Pesisir

Melihat sarana dan prasarana untuk tambat labuh yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat kurang. Apalagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan, selain itu dengan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil menjadikan transportasi menjadi sangat penting. Dalam kondisi eksisting tambat labuh masih kurang efisien untuk berlabuhnya perahu nelayan di dermaga dan juga lalu lalang nelayan saat bongkar muat. Dengan adanya normalisasi tambatan perahu di daerah pesisir akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. Dinas Perhubungan dalam hal normalisasi tambatan perahu difokuskan ke desa-desa wisata demi mendukung KEK Pariwisata, sub-sub sentra KIPT dan desa-desa untuk mendukung gerakan Gerbang Sari.

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk mengukur ketercapaian dari tujuan dan sasaran strategis tersebut disusunlah suatu indikator kinerja, sehingga pencapaian atas kinerja sasaran dapat diukur setiap tahun.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahunan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	Capaian Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Perencanaan Kinerja	Capaian Nilai Perencanaan Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Pengukuran Kinerja	Capaian Nilai Pengukuran Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Pelaporan Kinerja	Capaian Nilai Pelaporan Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Evaluasi Internal	Capaian Nilai Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Pencapaian Kinerja	Capaian Nilai Pencapaian Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kepala Dinas Perhubungan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Predikat Hasil Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Predikat Laporan Keuangan
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Jumlah PAD Sektor Pariwisata dibagi Jumlah PAD Kabupaten dikali 100%	Kepala Dinas Perhubungan	PAD Dinas Kepariwisata dan PAD Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PAD Sektor Transportasi dibagi Jumlah PDRB dikali 100%	Kepala Dinas Perhubungan	PAD Dinas Perhubungan dan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar

C. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022
-1	-2	-3	-4	-5
1.	Meningkatkan Akuntabilitas	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	57 (CC)
			- Perencanaan Kinerja	18,72
			- Pengukuran Kinerja	14,95
			- Pelaporan Kinerja	10,8
			- Evaluasi Internal	4,26
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	60%
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai
2.	Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Usaha Pariwisata	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	4,76%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022
-1	-2	-3	-4	-5
3.	Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Transportasi	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	13,50%

Dalam pencapaiannya kinerja sasaran strategis ditunjang oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Sesuai Renstra

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 100 100	7.329.994.863
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75	36.000.000
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja (Dokumen)	2	7.500.000
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1	4.875.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)	1	4.375.000
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	1	4.875.000
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD (Dokumen)	1	4.375.000
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, LKPJ dan LPPD (Laporan)	3	10.000.000
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	90	5.078.324.142
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	61	5.054.474.142

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	8.850.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	10.000.000
4)	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya RFK (Laporan)	4	5.000.000
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas SDM ASN	23	50.000.000
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang mengikuti Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)	5	50.000.000
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100	440.778.321
1)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (Unit)	613	36.218.321
2)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Spanduk yang dicetak (Lembar)	8	11.540.000
		Jumlah Foto Copy (Lembar)	23050	
		Jumlah Jilid Dokumen (Eksamplar)	136	
3)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang disediakan (Unit)	51	3.000.000
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Koran/Majalah (Eksamplar)	2.000	30.000.000
		Jumlah Iklan Media Cetak dan Elektronik (Kali)	9	
5)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat (Dos)	350	25.020.000
		Jumlah Makanan dan Minuman Tamu (Dos)	700	
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah (orang)	210	250.000.000
		Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Provinsi (orang)	76	
		Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi (Orang)	25	
7)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	4	85.000.000
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100	1.368.220.400
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100	132.950.000
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan (orang/bulan)	72	1.235.270.400
		Tersedianya Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Orang/Bulan)	211	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara	60	356.672.000
1)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara (m2)	100	50.000.000
		Panjang Pagar Kantor yang dipelihara (m)	35	
		Luas Halaman Kantor yang dipelihara (m2)		
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (unit)	11	250.000.000
3)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Peningkatan Usia Pakai Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II (%)	100	38.630.000
4)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (Unit)	25	18.042.000
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	30,69	1.680.000.000
1.	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	52	50.000.000
1)	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Data Fasilitas Perlengkapan Jalan/Keselamatan Jalan, Kepadatan Lalu Lintas dan Moda Transportasi (Laporan)	1	50.000.000
2.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	52	650.000.000
1)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota (LPJU) (Unit)	90	275.000.000
2)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota yang terpelihara (LPJU) (Unit)	188	375.000.000
3.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	89	70.000.000
1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal (Unit)	1	70.000.000
4.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	52	535.000.000
1)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan (Unit)	1	535.000.000
5.	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	52	375.000.000
1)	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam	Tersedianya Fasilitas Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Rambu-Rambu Lalu Lintas/Guadrail) (Unit)	3	250.000.000

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
2)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Penertiban Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru Perayaan Hari Besar Kenegaraan / Keagamaan dan Event Daerah (Kegiatan)	12	125.000.000
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	55,73%	1.490.000.000
1.	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	52	1.490.000.000
1)	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan / Revitalisasi / Rehabilitasi / Penambahan Panjang Tambatan Perahu (Unit)	6	1.200.000.000
2)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Operasioanl UPTD Pamatata, UPTD Pelabuhan Laut Lokal (%)	94,56	290.000.000
TOTAL				10.499.994.863

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun perjanjian kinerja dari tingkat eselon II sampai dengan tingkat eselon III, dan eselon IV.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	57,00 (CC)
		- Perencanaan Kinerja	18,72
		- Pengukuran Kinerja	14,95
		- Pelaporan Kinerja	10,80
		- Evaluasi Internal	4,26
		- Pencapaian Kinerja	8,27

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	60%
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	4,76%
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	13,50%

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 6.258.135.442	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 1.078.886.441	DAU dan PAD
3.	Program Pengelolaan Pelayanan	Rp 3.362.972.980	DAU dan PAD
	JUMLAH	Rp 10.699.994.863	

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100				100
2.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	%	100	20	30	30	20
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	%	100	20	30	30	20
4.	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Poin	75				75
5.	Meningkatnya Realisasi Penggunaan Anggaran	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	%	90	10	25	35	30

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
6.	Meningkatnya Kapasitas SDM ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM ASN	%	23	3	5	5	10
7.	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100	25	25	25	25
8.	Tersedianya Jasa dalam Menunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100	25	25	25	25
9.	Meningkatnya Usia Pakai Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara	%	60	25	20	10	5

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 65.000.000	DAU
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.751.639.750	DAU
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	DAU
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 496.655.121	DAU
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 957.628.000	DAU
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 348.422.000	DAU
	JUMLAH	Rp 6.669.344.871	

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas
Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Fasilitas Transportasi Antar Wilayah	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	%	55,73	12	13	15	15,73
2.	Tersedianya kebijakan penetapan Rencana Induk dan Daerah	Persentase Rencana Induk dan Daerah	%	40				40

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
	Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan						
3.	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	52	10	10	15	17
4.	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	3				3
5.	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	6				6
6.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	145	30	37	38	40

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	
2.	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp -	
3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 461.697.000	DAU
4.	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 1.091.947.500	DAU
5.	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 347.319.600	DAU
	JUMLAH	Rp 1.900.964.101	

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	%	30,69		15		15,69
2.	Tersedianya kebijakan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	%	52		25		27
3.	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	%	52	20	30	30	20
4.	Meningkatnya Layanan Terminal Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	89	20	20	20	29
5.	Terwujudnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	%	52		25		27
6.	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	1				1
7.	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	3	3	3	3
8.	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	96			45	51

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp	-
2.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp	-
3.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp	-
4.	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	-
5.	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp	50.000.000 DAU
6.	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	25.000.000 DAU

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 475.000.000	DAU
	JUMLAH	Rp 550.000.000	

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	4	1	1	1	1
2.	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	1	1	1	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Jasa Orang dan/atau barang antar kota dalam Kabupaten	Rp -	Rp
2.	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	
	JUMLAH	Rp -	

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasas Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Laporan	3	-	-	1	2

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
	Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
2.	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	20	5	5	5	5

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Rp -	
2.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp -	
	JUMLAH	Rp -	

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Dinas
Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	3	-	-	1	2

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp -	
	JUMLAH	Rp -	

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	4	1	1	1	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp	-
	JUMLAH	Rp	-

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja Kasubag. Program Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Tersedianya Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.000.000	DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 4.000.000	DAU
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 4.000.000	DAU
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.500.000	DAU
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 3.500.000	DAU
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 8.000.000	DAU
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 37.000.000	DAU
	JUMLAH	Rp 65.000.000	

Tabel 2.13
Perjanjian Kinerja Kasubag. Keuangan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan
2.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
4.	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen
5.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	43 Paket
6.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	56 Paket
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172 Laporan
8.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan
9.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
10.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
11.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit
12.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.734.139.750	DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5.000.000	DAU
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 7.500.000	DAU
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 5.000.000	DAU
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.000.000	DAU
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 199.000.000	DAU
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 200.000.000	DAU
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 128.452.000	DAU
9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 38.630.000	DAU
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 250.000.000	DAU
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 18.042.000	DAU
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 41.750.000	DAU
	JUMLAH	Rp 5.630.513.750	

Tabel 2.14
Perjanjian Kinerja Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas
Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
2.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	919 Paket
3.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
4.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
5.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
6.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50.000.000	DAU
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 38.115.121	DAU
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 11.540.000	DAU
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 30.000.000	DAU
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 15.000.000	DAU
6.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 829.176.000	DAU
	JUMLAH	Rp 973.831.121	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, dilakukan dengan mengukur pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sasaran kinerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kerangka pengukuran kinerja tersebut adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui peringkat kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran indikator kinerja digunakan skala penilaian kinerja pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

NO.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian suatu kinerja, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
 Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan kinerja.
- 2) Hasil Sedang
 Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
 Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal capaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan sepuluh indikator sasaran yang harus dicapai di tahun 2022 sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya Nilai SAKIP
------------------	---------------------------------

Sasaran “**Meningkatnya Nilai SAKIP**” diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan pengukuran realisasi capaian kinerja, yaitu Nilai SAKIP OPD, Pengukuran Kinerja, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Kinerja. Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1 Nilai SAKIP OPD	Poin	47,02 (CC)	52,51 (CC)	54,41 (CC)
		1.2 Perencanaan Kinerja	Poin	16,14	17,72	22,01
		1.3 Pengukuran Kinerja	Poin	9,69	13,75	12,5
		1.4 Pelaporan Kinerja	Poin	6,41	9,77	9,21
		1.5 Evaluasi Internal	Poin	3,13	3,88	3,33
		1.6 Pencapaian Kinerja	Poin	11,66	7,40	7,35

Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diketahui dari nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 karena belum ada hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2022 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sesuai surat

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 059/LAKIP/IV/2022/ITDA perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dari nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2021 diperoleh memperoleh capaian Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP adalah :

- 1) Indikator Nilai SAKIP OPD dengan nilai 54,41 dengan kategori CC (cukup);
- 2) Indikator Perencanaan Kinerja dengan nilai 22,72;
- 3) Indikator Pengukuran Kinerja dengan nilai 12,50;
- 4) Indikator Pelaporan Kinerja dengan nilai 9,21;
- 5) Indikator Evaluasi Internal dengan nilai 3,33; dan
- 6) Indikator Pencapaian Kinerja dengan nilai 7,35.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat”** diukur dengan satu indikator kinerja dengan pengukuran realisasi, yaitu Indek Kepuasan Layanan. Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat serta mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan, maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari penyelenggaraan pelayanan publik

kepada masyarakat, dimana salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah pelayanan pada UPT Terminal dan Perpustakaan. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pada pada UPT Terminal dan Perpustakaan diperlukan evaluasi dan perbaikan yang terus menerus agar pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mengukur kinerja dan upaya perbaikan itulah, maka dilaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Maksud dan tujuan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dan bertujuan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dilakukan terbatas di lingkungan UPT Terminal dan Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya, dengan jumlah responden sebanyak 50 yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar. Responden tersebut diambil dari pihak-pihak yang menerima pelayanan pada UPT Terminal dan Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 11 (sebelas) unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kecepatan pelayanan petugas;
2. Petugas melayani dengan ramah dan senyum;
3. Petugas cepat tanggap terhadap keluhan konsumen;

4. Petugas mampu memberikan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi konsumem;
5. Kemudahan akses loket atau meja layanan secara langsung;
6. Petugas yang memberikan pelayanan sangat bertanggung jawab;
7. Petugas memberikan pelayanan dengan kesabaran;
8. Prosedur pelayanan sangat mudah;
9. Lingkungan terminal bonea nyaman dan aman;
10. Sarana dan prasarana sangat menunjang pelayanan; dan
11. Petugas memberikan pelayanan dengan cepat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini untuk selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk survei kepuasan masyarakat, dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan

a. Kuesioner

Dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner ini disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. (kuesioner terlampir)

b. Bagian dari Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) Bagian I : Identitas responden meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama.
- 2) Bagian II : Identitas pengumpul data berisi nama dan NIP pihak pengumpul data.
- 3) Bagian III : Pendapat responden tentang pelayanan publik/mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

c. Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat

setuju sampai dengan tidak setuju, dengan nilai persepsi sebagai berikut:

- 1) Tidak setuju diberi nilai persepsi 1
- 2) Kurang setuju diberi nilai persepsi 2
- 3) Setuju diberi nilai persepsi 3
- 4) Sangat setuju diberi nilai persepsi 4

2. Penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data

a. Jumlah Responden

Jumlah responden yang menjadi sasaran kuesioner IKM ditetapkan sebanyak 50 responden, yang dipilih secara acak (random sampling) dengan cakupan bagian masyarakat pengguna layanan UPT Terminal dan Perparkiran.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- 1) Lokasi pengumpulan data digali dari kawasan UPT Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 2) Waktu pengumpulan data responden dilaksanakan ± selama 12 hari kerja.

3. Metode Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 11 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

a.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{11}$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,071) dengan rumus sebagai berikut :

b.

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

c.

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Hasil akhir kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari pelayanan UPT Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, disusun sebagai berikut:

1. Indeks per unsur pelayanan

Dari 50 responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan pada UPT Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, nilai rata-rata per unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan pada UPT Terminasi dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

	NILAI UNSUR PELAYANAN										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
Jumlah Nilai Per Unsur	118	122	120	117	118	113	120	115	112	110	115
Nilai unsur pelayanan	2.36	2.44	2.4	2.34	2.36	2.26	2.4	2.3	2.24	2.2	2.3
Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur	0.214	0.222	0.218	0.212	0.214	0.205	0.218	0.209	0.204	0.2	0.209
IKM	58.13										

Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik UPT Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 diperoleh Nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 58,13. Apabila mengacu pada tabel Nilai Persepsi, interval IKM, interval Konversi, IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berikut :

Tabel 3.4
Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62, 51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik

Dengan nilai interval konversi IKM yang berada pada interval nilai 43,76 – 62,50, maka mutu kinerja pelayanan UPT Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 bernilai **C** dengan kategori **Kurang Baik**.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kedepan, diprioritaskan perbaikan dan pengembangan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah yakni kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Sedangkan unsur yang memiliki nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

Sasaran 3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
------------------	------------------------------------------------------------------------------

Sasaran “**Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**” diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Indikator Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP. Sebagaimana Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamankan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini

sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Laporan Keuangan OPD sesuai SAP diperoleh dari hasil penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 karena sampai laporan ini dibuat, penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 belum rampung karena masih terdapat beberapa realisasi anggaran pada beberapa pos belanja yang belum selesai disusun.

Dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2021, Perangkat Daerah mengambil Kebijakan sebagai berikut:

1. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2020 yang sudah diaudit.
2. Aset yang diperoleh dalam tahun anggaran 2021 sesuai belanja tahun anggaran 2021 telah didistribusikan kepada setiap SKPD. Pendistribusian ini berdasarkan transaksi tahun anggaran 2021.
3. Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri no. 13 tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Beberapa laporan yang disajikan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dapat dilihat pada table-tabel berikut :

Tabel 3.5
Neraca Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

URAIAN	2021	2022
1	2	3
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	56.988.000,00	22.083.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	1.056,00
Kas di BLUD	-	-

URAIAN	2021	2022
1	2	3
Kas Dana BOS	-	-
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-
Kas Lainnya	-	-
Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-
Piutang Retribusi Daerah	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Piutang Lain lain PAD yang Sah	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Beban Dibayar Dimuka	6.613.841,00	4.938.213,00
Persediaan	22.515.500,00	8.098.600,00
JUMLAH ASET LANCAR	86.117.341,00	35.120.869,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-
Investasi dalam Obligasi	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
Dana Bergulir	-	-
Deposito Jangka Panjang	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-
Penyertaan Modal	-	-
Investasi Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0	0
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0	0
ASET TETAP		
Tanah	1.934.159.800,00	1.934.159.800,00
Peralatan dan Mesin	12.531.502.443,95	11.325.985.143,95
Gedung dan Bangunan	5.722.742.390,00	5.722.742.390,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.623.194.560,00	37.981.176.319,00
Aset Tetap Lainnya	898.700.000,00	898.700.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.035.736.040,00	1.035.736.040,00
	-	-
Akumulasi Penyusutan	18.753.610.744,31	15.307.961.125,27
JUMLAH ASET TETAP	53.992.424.489,64	43.590.538.567,68
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	0	0
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	74.000.000,00	74.000.000,00
Aset Lain lain	85.426.801,00	85.426.801,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-70.300.000,00	-55.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA	89.126.801,00	103.926.801,00
JUMLAH ASET	54.167.668.631,64	43.729.586.237,68
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-

URAIAN	2021	2022
1	2	3
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	8.184.751,00	5.031.805,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	253.644.500,00	221.190.539,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	261.829.251,00	226.222.344,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Utang kepada Masyarakat	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	261.829.251,00	226.222.344,00
EKUITAS		
EKUITAS	53.905.839.380,64	43.503.363.893,68
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	54.167.668.631,64	43.729.586.237,68

Tabel 3.6
Laporan Realisasi APBD Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	843.063.500,00	794.829.500,00	94,28	653.328.205,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	843.063.500,00	794.829.500,00	94,28	653.328.205,00
4.1.2	Retribusi Daerah	843.063.500,00	794.829.500,00	94,28	653.328.205,00
5	BELANJA DAERAH	11.071.997.539,00	10.055.114.772,00	90,82	8.889.667.489,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.047.333.500,00	7.398.220.035,00	91,93	7.214.589.618,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.154.520.000,00	4.973.501.367,00	96,49	4.807.436.826,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.892.813.500,00	2.424.718.668,00	83,82	2.407.152.792,00
5.2	BELANJA MODAL	3.024.664.039,00	2.656.894.737,00	87,84	1.675.077.871,00
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.170.500,00	164.400.500,00	99,53	179.491.050,00
5.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.459.493.539,00	2.106.004.139,00	85,63	209.115.036,00
5.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000,00	386.490.098,00	96,62	1.286.471.785,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-10.228.934.039,00	-9.260.285.272,00	90,53	-8.236.339.284,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-10.228.934.039,00	-9.260.285.272,00	90,53	-8.236.339.284,00

Tabel 3.7
Laporan Operasional Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN LO	794.829.500,00	657.228.205,00	137.601.295,00	20,94
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LO	794.829.500,00	653.328.205,00	141.501.295,00	21,66
7.1.1	Pajak Daerah LO	0	0	0,00	0
7.1.2	Retribusi Daerah LO	794.829.500,00	653.328.205,00	141.501.295,00	21,66
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO	0	0	0,00	0
7.1.4	Lain lain PAD yang Sah LO	0	0	0,00	0
7.2	PENDAPATAN TRANSFER LO	0	0	0,00	0
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO	0	0	0,00	0
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah LO	0	0	0,00	0
7.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LO	0	3.900.000,00	- 3.900.000,00	-100
7.3.1	Pendapatan Hibah LO	0	3.900.000,00	-3.900.000,00	-100
7.3.2	Dana Darurat LO	0	0	0,00	0
7.3.3	Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan LO	0	0	0,00	0
7.3.4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP LO	0	0	0,00	0
8	BEBAN	9.754.203.827,39	9.148.755.508,29	605.448.319,10	6,62
8.1.1	Beban Pegawai	4.973.501.367,00	4.807.436.826,00	166.064.541,00	3,45
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.448.879.961,00	2.409.385.141,00	39.494.820,00	1,64
8.1.3	Beban Bunga	0	0	0,00	0
8.1.4	Beban Subsidi	0	0	0,00	0
8.1.5	Beban Hibah	0	0	0,00	0
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0	0	0,00	0
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0	0	0,00	0
8.1.8	Beban Lain lain	0	0	0,00	0
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.107.846.749,00	982.167.963,29	125.678.785,71	12,80
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.454.847,80	111.456.573,00	2.998.274,80	2,69
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.094.720.902,59	823.509.005,00	271.211.897,59	32,93
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	0
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0,00	0
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0	0	0,00	0
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0	0	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	- 8.959.374.327,39	- 8.491.527.303,29	- 467.847.024,10	5,51
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO	0	0	0,00	0
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO	0	0	0,00	0
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO	0	0	0,00	0
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO	0	0	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	- 8.959.374.327,39	- 8.491.527.303,29	- 467.847.024,10	5,51
	POS LUAR BIASA			0,00	0
8.4.1	Beban Tak Terduga	0	0	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	-	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT LO	- 8.959.374.327,39	- 8.491.527.303,29	- 467.847.024,10	5,51

Tabel 3.8
Laporan Perubahan Ekuitas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

URAIAN	2021	2022
1	2	3
EKUITAS AWAL	43.503.363.893,68	0
SURPLUS/DEFISIT LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-8.959.374.327,39	-8.491.527.303,29
Koreksi Ekuitas	10.066.660.598,35	0
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.295.189.216,00	1.056,00
EKUITAS AKHIR	53.905.839.380,64	-8.491.526.247,29

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun anggaran 2021, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2021. Selain itu, tidak terdapat juga kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah yang diharapkan dapat memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum meskipun harus diakui belum seluruhnya diterapkan. Atas kekurangan-kekurangan tersebut, tentunya akan dilakuakn perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Sasaran 4 **Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata**

Sasaran “**Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata**” diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten. Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase

Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten} &= \frac{\text{Jumlah PAD Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah PAD Kabupaten}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp 13.529.000}}{\text{Rp 50.695.462.462,63}} \times 100\% \\ &= 2,67 \% \end{aligned}$$

Sasaran Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata memiliki tujuan untuk mendukung peningkatan potensi kepariwisataan terutama dari sektor transportasi. Dukungan dari sektor transportasi terutama untuk lokasi wisata pada wilayah kepulauan nantinya diharapkan adanya tempat pendaratan helikopter dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi penerbitan izin mendirikan tempat pendaratan helikopter. Pada tahun 2022 dengan indikator Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten, sasaran ini tidak didukung oleh pelaksanaan program kegiatan karena terdapat program kegiatan yang lebih penting untuk dibiayai selain itu untuk memberikan rekomendasi penerbitan perizinan tersebut tidak membutuhkan biaya besar dan dapat dianggarkan pada kegiatan rutin.

Sasaran 5

Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah

Sasaran “**Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah**” diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB. Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

Persentase Kontribusi

Sektor Industri Pengelolaan, = $\frac{\text{Jumlah PAD dari sektor transportasi}}{\text{Jumlah PAD Kabupaten}} \times 100\%$

Transportasi dan

Perdagangan terhadap = $\frac{\text{Rp 830.006.020}}{\text{Rp 6.835.400.000.000}} \times 100\%$

PDRB

= 1,21%

Capaian kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB diperoleh dari perbandingan antara jumlah PAD sektor transportasi dengan jumlah PAD kabupaten. Data PAD sektor transportasi diperoleh dari besarnya realisasi capaian PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5	6
I.	Retribusi Jasa Umum				
1.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	177.969.000	200.024.000	112,39	
II.	Retribusi Jasa Usaha				
1.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	6.200.000	11.600.000	187,10	
2.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70.344.000	5.377.000	7,64	
3.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	23.000.000	22.834.000	99,28	
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	629.069.600	590.171.020	93,82	
JUMLAH		906.582.600	830.006.020	91,55	

Hasil dari pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1 Nilai SAKIP OPD	Poin	57	54,41	95,46%	Sangat Baik
		1.2 Perencanaan Kinerja	Poin	18,72	22,01	117,57%	Sangat Baik
		1.3 Pengukuran Kinerja	Poin	14,95	12,5	83,61%	Baik
		1.4 Pelaporan Kinerja	Poin	10,8	9,21	85,28%	Baik
		1.5 Evaluasi Internal	Poin	4,26	3,33	78,17%	Baik
		1.6 Pencapaian Kinerja	Poin	8,27	7,35	88,88%	Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1 Indeks Kepuasan Layanan		60	58,13	96,88	-
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepulauan	3.1 Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	100	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1 Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	4,76	2,67	56,09%	Rendah
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatkan Transportasi Antar Wilayah	5.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	%	13,5	1,21	8,96%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel di atas dari 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori capaian sangat baik yaitu 1) Indikator Nilai SAKIP OPD dengan target kinerja 57 poin terealisasi 54,41 poin dengan capaian sebesar 95,46%, 2) Indikator Perencanaan Kinerja dengan target kinerja 18,72 poin terealisasi 22,01 dengan capaian sebesar 117,57% atau melampaui target, 3) Indikator Indeks Kepuasan Layanan dengan target

kinerja 60 poin terealisasi 58,13 poin dengan capaian sebesar 96,88%, dan 4) Indikator Laporan Keuangan sesuai SAP dengan target sesuai SAP mampu direalisasikan sesuai dengan Laporan Keuangan tahun 2021 yang berarti tercapai 100%.

Selain indikator kinerja dengan kategori capaian sangat baik, terdapat pula 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori capaian baik, yaitu 1) Indikator Pengukuran Kinerja dengan target kinerja 14,95 poin terealisasi 12,50 poin dengan capaian sebesar 83,61%, 2) Indikator Pelaporan Kinerja dengan target 10,80 poin terealisasi 9,21 poin dengan capaian sebesar 85,28%, 3) Indikator Evaluasi Kinerja dengan target 4,26 poin terealisasi 3,33 poin dengan capaian sebesar 78,17%, dan 4) Indikator Pencapaian Kinerja dengan target 8,27 poin terealisasi 7,35 poin dengan capaian sebesar 88,88%. Terdapat pula satu indikator kinerja dengan kategori capaian rendah, yaitu Indikator Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten dengan target 4,76% terealisasi 2,67% dengan capaian sebesar 56,09%, serta satu indikator kinerja dengan kategori capaian sangat rendah, yaitu Indikator Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB dengan target 13,50% terealisasi 1,21% dengan capaian 8,96%.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2021, sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya;

- 3) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra);
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten lain dalam satu wilayah provinsi;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun analisis hasil capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sesuai yang ditetapkan dalam perencanaan strategis, diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1	Nilai SAKIP OPD	Poin	57 (CC)	54,41 (CC)	95,46%	Sangat Baik
		1.2	Perencanaan Kinerja	Poin	18,72	22,01	117,57%	Sangat Baik
		1.3	Pengukuran Kinerja	Poin	14,95	12,5	83,61%	Baik
		1.4	Pelaporan Kinerja	Poin	10,8	9,21	85,28%	Baik
		1.5	Evaluasi Internal	Poin	4,26	3,33	78,17%	Baik
		1.6	Pencapaian Kinerja	Poin	8,27	7,35	88,88%	Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1	Indeks Kepuasan Layanan		60	58,13	96,88	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.1	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	100	Sangat Baik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
	Daerah dengan wilayah kepulauan						
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1 Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	4,76	2,67	56,09%	Rendah
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	%	13,5	1,21	8,96%	Sangat Kurang

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022 termasuk dalam kategori baik. Dari 10 (sepuluh) indikator yang ditetapkan terdapat satu indikator yang melebihi target yaitu Indikator Perencanaan Kinerja, sementara dari kategori capaian terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori capaian sangat baik yaitu Indikator Nilai SAKIP OPD, Perencanaan Kinerja, Indeks Kepuasan Layanan, dan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP, selain itu, 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori capaian baik yaitu Indikator Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Kinerja. Terdapat pula satu indikator kinerja dengan kategori capaian rendah yaitu indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten serta satu indikator kinerja dengan kategori capaian sangat kurang yaitu indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB.

Capaian indikator kinerja dengan kategori sangat baik tentunya tidak lepas dari upaya dan komitmen dan kerjasama jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memperbaiki pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelayanan kepada masyarakat, menselaraskan setiap dokumen perencanaan, dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Perbandingan Antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran SAKIP tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1 Nilai SAKIP OPD	Poin	47,02 (CC)	52,51 (CC)	54,41 (CC)
		1.2 Perencanaan Kinerja	Poin	16,14	17,72	22,01
		1.3 Pengukuran Kinerja	Poin	9,69	13,75	12,5
		1.4 Pelaporan Kinerja	Poin	6,41	9,77	9,21
		1.5 Evaluasi Internal	Poin	3,13	3,88	3,33
		1.6 Pencapaian Kinerja	Poin	11,66	7,40	7,35
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1 Indeks Kepuasan Layanan				58,13
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepulauan	3.1 Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	Sesuai
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1 Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%			2,67
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	%			1,21

Dari tabel di atas, nampak capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak secara keseluruhan

dapat diperoleh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengingat tahun ini merupakan tahun pertama periode pelaksanaan Renstra. Dari tabel di atas, terdapat dua indikator kinerja dengan capaian yang mengalami peningkatan, yaitu Indikator Nilai SAKIP OPD dan Perencanaan Kinerja. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tindaklanjut perbaikan atas rekomendasi laporan hasil evaluasi SAKIP setiap tahunnya serta perbaikan pada penyusunan dokumen perencanaan.

Selain capaian yang meningkat, terdapat pula capaian indikator kinerja yang berfluktuatif, yaitu indikator Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja, sementara dua indikator kinerja lainnya mengalami penurunan capaian dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi sejak tahun 2019 sehingga terjadi pengurangan nilai pagu anggaran karena dialihkan pada penanganan Pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak maksimal lagi dalam pelaksanaannya. Sementara untuk indikator lainnya tidak terdapat data pada tahun sebelumnya mengingat tahun 2022 adalah tahun pertama periode pelaksanaan Renstra dan merupakan indikator kinerja baru yang tidak rutin laksanakan.

3. Perbandingan Antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Strategis.

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.13
Kemajuan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perhubungan**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=(4/5)*100$
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1 Nilai SAKIP OPD	54,41 (CC)	75 (BB)	72,55
		1.2 Perencanaan Kinerja	22,01	21,95	100,27

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=(4/5)*100
		1.3 Pengukuran Kinerja	12,5	19,47	64,20
		1.4 Pelaporan Kinerja	9,21	14	65,79
		1.5 Evaluasi Internal	3,33	7,88	42,26
		1.6 Pencapaian Kinerja	7,35	11,7	62,82
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1 Indeks Kepuasan Layanan	58,13	80	72,66
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepulauan	3.1 Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Tercapai
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1 Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	2,67	8,07	33,09
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	1,21	16,00	7,56

Tingkat kemajuan capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 jika dibandingkan dengan target akhir pada dokumen Renstra terdapat satu indikator yang sudah melampaui target akhir Renstra, yaitu indikator Perencanaan Kinerja. Sementara itu, indikator kinerja lainnya belum mencapai target kinerja akhir Renstra namun mengingat masih pada tahun pertama periode Renstra sehingga masih banyak waktu yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan guna mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target akhir pada periode Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan yang telah ditetapkan seperti tabel di atas, maka hal yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Perlunya media website perangkat daerah sebagai sarana publikasi dokumen SAKIP;

- 2) Perlunya pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka peningkatan kemampuan dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Perlunya keselarasan dokumen perencanaan sehingga memudahkan dalam proses pengukuran, evaluasi dan pelaporan; dan
- 4) Perlunya perubahan atau revisi dokumen perencanaan strategis karena terdapat beberapa indikator kinerja utama perangkat daerah yang tidak sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan perangkat daerah pada tingkat kabupaten.
- 5) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pada UPT Terminal dan Perparkiran terutama pada prasarana dan fasilitas pelayanan yang ada sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1 Nilai SAKIP OPD	57 (CC)	54,41 (CC)	52,51	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya website untuk mempublikasikan dokumen SAKIP - Minimnya sumber daya dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan untuk pembuatan website - Perlunya tambahan sumber daya pada Sub Bagian Program
		1.2 Perencanaan Kinerja	18,72	22,01	117,57	Adanya perbaikan dalam penyusunan	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						dokumen perencanaan	
		1.3 Pengukuran Kinerja	14,95	12,5	83,61	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai rencana aksi - Belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan pengumpulan data kinerja secara berkala setiap bulan sesuai rencana aksi - Mengupayakan pengadaan aplikasi dalam pengukuran kinerja
		1.4 Pelaporan Kinerja	10,8	9,21	85,28	Laporan kinerja belum diupload pada website	Mengupayakan untuk pmbatan wesite
		1.5 Evaluasi Internal	4,26	3,33	78,17	Hasil evaluasi Renaksi belum ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak berkepentingan	Menyampaikan hasil evaluasi rencana aksi kepada pihak berkepentingan
		1.6 Pencapaian Kinerja	8,27	7,35	88,88	Hasil capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Penyempurnaan pelaporan kinerja dengan dukungan data akurat
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1 Indeks Kepuasan Layanan	60	58,13	96,88	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pelayanan terminal yang belum lengkap dan memadai - Angdes belum memanfaatkan terminal sebagai tempat bongkar muat penumpang - Banyak fasilitas yang membutuhkan pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalokasian anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan fasilitas layanan terminal - Perlunya penertiban Angdes
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepualauan	3.1 Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Tercapai	- Adanya kerjasama dalam penyediaan eviden laporan keuangan	
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1 Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	4,76	2,67	56,09	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak didukung pelaksanaan program kegiatan - Bukan merupakan sasaran kinerja urusan perhubungan 	Mengusulkan untuk revisi dokumen Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	13,5	1,21	8,96	Sebagian besar Prasarana penyumbang PAD sektor transportasi diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi	Mengupayakan adanya tambahan sumber PAD sektor transportasi

Dari tabel analisa keberhasilan/kegagalan indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja yang belum/tidak mencapai target sesuai apa yang direncanakan, maka dapat disimpulkan faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah :

- 1) Tidak adanya dokumen Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) sebagai dasar perencanaan program pembangunan transportasi yang terorganisir secara kesisteman sehingga mampu mewujudkan transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi daerah dan nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan regional, dan nasional.
- 2) Belum adanya website untuk mempublikasikan dokumen SAKIP;
- 3) Minimnya sumber daya dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- 4) Belum adanya pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai rencana aksi;
- 5) Belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja;
- 6) Hasil evaluasi Renaksi belum ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak berkepentingan;
- 7) Hasil capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

- 8) Fasilitas pelayanan terminal yang belum lengkap dan memadai;
- 9) Angdes belum memanfaatkan terminal sebagai tempat bongkar muat penumpang
- 10) Banyak fasilitas yang membutuhkan pemeliharaan;
- 11) Terdapat sasaran yang bukan merupakan sasaran kinerja urusan perhubungan; dan
- 12) Sebagian besar Prasarana penyumbang PAD sektor transportasi diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi capaian indikator, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran dengan menggunakan rumus :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AAKRO_j$: alokasi anggaran KRO j

$RAKRO_j$: realisasi anggaran KRO j

CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO j

m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja

n : Jumlah RO pada suatu KRO

Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	Anggaran		Perkalian Capaian Indikator 4	Cpaian Indikator per Sasaran	Alokasi Anggaran x Capaian Indikator per Sasaran	(Alokasi Anggaran x Capaian Indikator per Sasaran) - Realisasi Anggaran Sasaran	Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran	
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)						
1	2	3	4	5	6		7 = Rata-Rata Geometrik 4	8 = (5 x 7)	9 = (8 - 5)	10 = (Jml.9) / (Jml.5)	
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1	Nilai SAKIP OPD	52,51%	49.080.000	44.725.000	30,58%	82,08%	40.285.854	-8.794.146	-34,21%
		1.2	Perencanaan Kinerja	117,57%							
		1.3	Pengukuran Kinerja	83,61%							
		1.4	Pelaporan Kinerja	85,28%							
		1.5	Evaluasi Internal	78,17%							
		1.6	Pencapaian Kinerja	88,88%							
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1	Indeks Kepuasan Layanan	96,88%	1.800.527.121	167.961.713	96,88%	96,88%	1.744.350.675	-56.176.446	
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepulauan	3.1	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	100%	4.272.066.000	4.211.752.840	100%	1,00	4.272.066.000	-	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	Anggaran		Perkalian Capaian Indikator 4	Cpaian Indikator per Sasaran	Alokasi Anggaran x Capaian Indikator per Sasaran	(Alokasi Anggaran x Capaian Indikator per Sasaran) - Realisasi Anggaran Sasaran	Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)					
1	2	3	4	5	6		7 = Rata-Rata Geometrik 4	8 = (5 x 7)	9 = (8 - 5)	10 = (Jml.9) / (Jml.5)
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1 Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	56,09%	0,00	0,00	56,09%	56,09%	-	-	
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	8,96%	3.570.273.100	3.291.646.938	8,96%	8,96%	319.896.470	-3.250.376.630	
Jumlah				9.691.946.221	7.716.086.491	3		6.376.598.998	-3.315.347.223	
Tingkat Efisiensi				$\frac{\sum((AAKRO \times (CRO)^{(1/n))} - RARO)}{\sum(AARO (Jml\ 9) / (Jml\ 5))}$				-34,21%		

Tingkat efisiensi yang diperoleh dari formulasi di atas tidak memiliki skala 0% - 100%, sehingga perlu melakukan transformasi skala efisiensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi capaian kinerja dan anggaran tujuan Dinas Perhubungan pada tabel 3.15, maka nilai efisiensi kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 adalah sebesar:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left(\frac{ESK}{20} \times 50 \right) \\ &= 50\% + \left(\frac{-34,21\%}{20} \times 50 \right) \\ &= 50\% + -1,71\% \times 50 \\ &= 50\% + -85,53\% \\ &= 35,53\% \end{aligned}$$

Jika nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal 0%. Selanjutnya nilai efisiensi ditentukan dengan kriteria :

- a) Nilai efisiensi lebih dari 90% maka pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien;
- b) Nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90% maka pelaksanaan anggaran dikatakan efisien;
- c) Nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, maka pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien;

- d) Nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, maka pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien; dan
- e) Nilai efisiensi dibawah dari 50%, maka pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

Dari nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 35,53%, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 termasuk dalam kriteria sangat kurang efisien. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya efisiensi penggunaan anggaran guna mencapai tujuan dan sasaran strategis antara lain :

- 1) Terdapat indikator kinerja sasaran dengan indikator kinerja yang bukan merupakan urusan perhubungan.
- 2) Terdapat sub kegiatan yang tidak mendukung pencapaian kinerja sasaran karena rincian belanja dalam sub kegiatan tersebut tidak sesuai dengan output yang akan dihasilkan.

Adapun upaya sebagai bahan perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya penentuan indikator kinerja sasaran yang berorientasi hasil atau outcome serta sesuai dengan bidang urusan Perhubungan sehingga mampu diwujudkan dengan maksimal melalui dukungan pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- 2) Mengoptialkan penggunaan anggaran secara efektif pada pelaksanaa program dan kegiatan yang mendukung dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang atau tidak terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program dan Kegiatan dan Solusi Capaian
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1 Nilai SAKIP OPD	52,51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Penunjang)	94,36	Menunjang
		1.2 Perencanaan Kinerja	117,57	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	90,68	Menunjang
		1.3 Pengukuran Kinerja	83,61	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100	Menunjang
		1.4 Pelaporan Kinerja	85,28	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun	100	Menunjang
		1.5 Evaluasi Internal	78,17	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan yang tersusun	100	Menunjang
		1.6 Pencapaian Kinerja	88,88	- Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA pokok yang tersusun	100	Menunjang
				- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA perubahan yang tersusun	100	Menunjang
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	100	Menunjang
				- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan	100	Menunjang
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1 Indeks Kepuasan Layanan	96,88	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	97,1	Menunjang
				- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik yang disediakan	116,63	Menunjang
				- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	Menunjang
				- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	97,06	Menunjang

DISHUB_LkjIP_TH.2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Foto Copy	100	Menunjang
					Jumlah Jilid Dokumen	100	
					Jumlah Spanduk yang dicetak	100	
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Iklan Media Cetak dan Elektronik	100	Menunjang
					Jumlah Langganan Koran/ Majalah	100	
				- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	74,07	Menunjang
				- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi	100	Menunjang
					Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Daerah	100	
					Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Provinsi	100	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	89,12	Menunjang
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	78	Menunjang
				- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penerima Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	93,51	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipelihara	100	Menunjang
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang ditingkatkan usia pakainya	100	Menunjang
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang ditingkatkan usia pakainya	100	Menunjang

DISHUB_LajIP_TH.2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Jumlah Kendaraan yang ditingkatkan usia pakainya	100	Menunjang
				- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	100	Menunjang
					Panjang Pagar Kantor yang dipelihara	100	
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepualauan	3.1 Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Tercapai	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan	100	Menunjang
				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	100	Menunjang
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	100	Menunjang
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	100	Menunjang
				- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan RFK yang tersusun	100	Menunjang
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1 Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	56,09				Pada tahun 2022 tidak ditunjang pelaksanaan program dan kegiatan
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	8,96	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kabupaten (Prioritas)	82,21	Menunjang
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	98,1	Menunjang
				- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fasilitas Perlengkapan Jalan/ Keselamatan Jalan, Kepadatan Lalu Lintas dan Moda Transportasi yang tersusun	100	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan	98,6	Menunjang

DISHUB_LkjIP_TH.2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten		
				- Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota yang terpelihara	100	Menunjang
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	94,19	Tidak Menunjang
				- Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan	100	Tidak Menunjang
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	95,38	Menunjang
				- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penertiban Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru Perayaan Hari Besar Kenegaraan / Keagamaan dan Event Daerah	100	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang layak fungsi	89,75	Menunjang
				Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	58,8	Menunjang
				- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersusun Jumlah Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersusun	100	Menunjang
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	59,25	Menunjang
				- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan/ Revitalisasi / Rehabilitasi / Penambahan Panjang Tambatan Perahu	100	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Operasioanl UPTD Pamatata, UPTD Pelabuhan Laut Lokal	97,29	Menunjang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak ditunjang dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, yaitu sasaran Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata, hal ini disebabkan oleh output yang diharapkan dari sasaran ini hanya berupa pemberian rekomendasi pembangunan landasan helikopter pada kawasan pariwisata dimana hal ini cukup jika dianggarkan dalam pelaksanaan anggaran rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar saja. Selain hal tersebut, sesuai dengan perencanaan strategis indikator kinerja dari sasaran kinerja ini juga merupakan indikator pariwisata bukan urusan perhubungan.

Dari tabel diatas tampak pula kegiatan dan sub kegiatan yang tidak menunjang pencapaian kinerja sasaran, yaitu Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan sub kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal dimana output yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan tersebut adalah Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan namun kenyataannya pelaksanaan dari sub kegiatan tersebut hanya merupakan pelaksanaan kebutuhan operasional UPT Terminal dan Perparkiran sehingga tidak menunjang pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah adalah.

C. Realisasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022, rencana anggaran pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar Rp 906.582.600

dan anggaran Belanja sebesar Rp 9.221.086.491. Adapun rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	906.582.600,00	803.669.420,00	88,65	794.829.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	906.582.600,00	803.669.420,00	88,65	794.829.500,00
4.1.2	Retribusi Daerah	906.582.600,00	803.669.420,00	88,65	794.829.500,00
5	BELANJA DAERAH	9.691.946.221,00	9.221.086.491,00	95,14	10.055.114.772,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.025.451.721,00	6.613.266.041,00	94,13	7.398.220.035,00
5.1.1	Belanja Pegawai	4.261.086.000,00	4.202.192.840,00	98,62	4.973.501.367,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.764.365.721,00	2.411.073.201,00	87,22	2.424.718.668,00
5.2	BELANJA MODAL	2.666.494.500,00	2.607.820.450,00	97,80	2.656.894.737,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	888.547.000,00	888.160.600,00	99,96	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.000.000,00	161.000.000,00	100,00	164.400.500,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.391.947.500,00	1.335.927.850,00	95,98	2.106.004.139,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.000.000,00	222.732.000,00	98,99	386.490.098,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-8.785.363.621,00	-8.417.417.071,00		-9.260.285.272,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-8.785.363.621,00	-8.417.417.071,00		-9.260.285.272,00

Dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2022 pada belanja modal yang terdiri dari :

- 1) Belanja modal tanah yang merupakan pelaksanaan pada Sub. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan senilai Rp 888.160.600 yang terdiri dari belanja modal Tanah Pembangunan Pelabuhan Desa Lamantu Kec. Pasimarannu dan Pembangunan Pelabuhan Desa Nyiur Indah Kec. Takabonerate.

- 2) Belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp 161.000.000 terdiri dari Pengadaan Alat Keselamatan Pelayaran, Belanja Pengadaan AC Standing, dan belanja pengadaan Radio Olben Icon.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp 1.335.927.850 terdiri dari belanja Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Beton Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu, Pembangunan Tambatan Perahu Desa Laiyolo, Pembangunan Tambatan Perahu Labuang Nipayya Kec. Bontomatene, Penambahan Panjang/Rehabilitasi Tambatan Perahu Ujung Kec. Pasimasunggu Timur, Rehabilitasi Tambatan Perahu Menara Indah, Pembangunan Tempat Parkir Wisata, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Kec. Bontomanai, dan Pengadaan dan Pemasangan Guadrail Lembang Bau - Laloasa Desa Bonea Timur.
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp 222.732.000, terdiri dari Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya di Desa Onto, dan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya di Dusun Tanaberu.

Tabel 3.18
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Jenis penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6
	Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	177.969.000	175.227.000	98,46	
	Retribusi Jasa Usaha				
1	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	6.200.000	11.600.000	187,10	
2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70.344.000	5.229.000	7,43	
3	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	23.000.000	8.469.000	36,82	
4	Retribusi Pelayanan Pepelabuhanan	629.069.600	603.144.420	95,88	
JUMLAH		906.582.600	803.669.420	88,65	

Dari pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 secara keseluruhan dapat dikatakan sangat baik. Dari 4 (empat) item retribusi terdapat retribusi dengan nilai capaian diatas 100% atau melebihi target yang direncanakan, yaitu Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dengan capaian realisasi sebesar 187,10%. Capaian tersebut didukung oleh semakin membaiknya situasi pandemi, pemerintah mulai melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat sebagai transisi dari pandemi ke endemi sehingga berdampak pada pelonggaran aktivitas masyarakat, hal tersebut berdampak pada meningkatnya masyarakat pengguna bus sekolah yang sehingga mampu mendokrak meningkatnya capaian PAD jasa pemakaian kendaraan bermotor.

Selain retribusi yang memiliki capaian melebihi target, terdapat satu item retribusi dengan realisasi capaian sangat kurang, yaitu Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum dengan capaian 7,43%. Capaian ini dipengaruhi oleh faktor semakin banyaknya angkutan umum liar seperti angkutan travel yang berdampak pada berkurangnya masyarakat pengguna angkutan umum bus yang melalui terminal.

**Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.691.946.221	9.221.086.491	95,14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.121.673.121	5.929.439.553	96,86
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.080.000	44.725.000	91,13
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.620.000	3.580.000	98,90
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.950.000	2.950.000	100,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.750.000	2.750.000	100,00
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.190.000	2.190.000	100,00
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.350.000	2.350.000	100,00
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	4.500.000	100,00

DISHUB_LajIP_TH.2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.720.000	26.405.000	85,95
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.272.066.000	4.211.752.840	98,59
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.261.086.000	4.202.192.840	98,62
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.680.000	2.270.000	61,68
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.300.000	5.290.000	99,81
4)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	2.000.000	100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.077.121	530.217.315	97,10
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.600.000	2.600.000	100,00
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.000.000	161.000.000	100,00
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.937.121	33.763.121	99,49
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.540.000	11.540.000	100,00
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	18.520.000	61,73
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	11.112.000	74,08
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.000.000	291.682.194	99,89
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	906.028.000	807.414.518	89,12
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.452.000	82.736.118	64,41
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	777.576.000	724.678.400	93,20
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.422.000	335.329.880	96,24
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.630.000	38.437.710	99,50
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	238.126.170	95,25
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.042.000	17.032.000	94,40
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.750.000	41.734.000	99,96
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	990.081.600	979.610.007	98,94
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	39.800.000	39.800.000	100,00
1)	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	39.800.000	39.800.000	100,00
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	871.619.600	865.377.957	99,28
1)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	525.000.000	518.772.000	98,81
2)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	346.619.600	346.605.957	100,00
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	58.662.000	55.257.050	94,20
1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	58.662.000	55.257.050	94,20
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20.000.000	19.175.000	95,88
1)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	20.000.000	19.175.000	95,88

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.580.191.500	2.312.036.931	89,61
1	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	459.697.000	247.368.752	53,81
1)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	459.697.000	247.368.752	53,81
2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.120.494.500	2.064.668.179	97,37
1)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	888.547.000	888.160.600	99,96
2)	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.091.947.500	1.039.887.850	95,23
3)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	140.000.000	136.619.729	97,59

Dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2022 dapat dikatakan sebagian besar memiliki realisasi anggaran yang sangat baik dengan capaian diatas 85%. Hanya terdapat 4 (empat) sub kegiatan dengan realisasi anggaran diatas 50% sampai 65%, yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian 61,68%, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian 61,73%, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian 64,41%, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan capaian realisasi anggaran 53,81%.

Faktor yang mempengaruhi sehingga capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan tersebut diatas 50% sampai 65% adalah :

- 1) Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal anggaran yang tidak terealisasi sebesar 46,29% adalah dana lunturnya Penyusunan Study Kelayakan dan Master Plan Bandara Kayuadi untuk Peningkatan Status dari Bandara Caravan Menjadi Bandara Perintis sejumlah Rp 209.697.000, belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi sejumlah Rp 2.055.000, dan belanja

Penyusunan UKL/UPL Dermaga Penyeberangan Desa Kembang Ragi (luncuran ke tahun 2023) sejumlah Rp 576.248.

- 2) Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran yang tidak terealisasi sebesar 38,32% adalah belanja perjalanan dinas dalam daerah daratan sejumlah Rp 1.410.000.
- 3) Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran yang tidak terealisasi sebesar 25,59% merupakan dana SILPA tahun 2022.
- 4) Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran yang tidak terealisasi sebesar 28,27%, yaitu Belanja Iklan di Media Cetak sejumlah Rp 3.200.000, Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah sejumlah Rp 7.980.000, dan Belanja Cetak / Penggandaan sejumlah Rp 300.000.

BAB IV P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022, yaitu:

1. Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan secara umum pencapaian indikator kinerja sasaran stategis masih tergolong dalam kriteria baik.
2. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan kategori capaian Sangat Baik yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja melebihi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan kinerja, yaitu Indikator kinerja Nilai SAKIP OPD, Perencanaan Kinerja, dan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP.
3. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran dengan kategori capaian baik, yaitu indikator kinerja Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Kinerja.
4. Terdapat satu indikator kinerja sasaran dengan kategori capaian Rendah, yaitu Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten.
5. Terdapat satu indikator kinerja sasaran dengan kategori Sangat Kurang, yaitu Persentase Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB.
6. Perbandingan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan kriteria efisiensi sangat rendah dengan tingkat efisiensi sebesar -34,21% dengan nilai efisiensi sebesar 35,53% yang bermakna pelaksanaan anggaran sangat kurang efisien dalam menunjang upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Saran yang dapat diambil sebagai perbaikan kedepan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang perhubungan adalah:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi serta sosialisasi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan angkutan umum.
2. Peningkatan sinergitas dan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka peningkatan disiplin dan tertib berlalu lintas bagi masyarakat terutama pemilik moda angkutan umum.
3. Perlu adanya dokumen Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) sebagai dasar perencanaan program pembangunan transportasi yang terorganisir secara kesisteman sehingga mampu mewujudkan transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi daerah dan nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan regional, dan nasional.
4. Perlunya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka lanjutan dari penyusunan dokumen study pembangunan pelabuhan penyeberangan diwilayah kepulauan agar dapat berlanjut pada tahap pembangunan melihat wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar terdiri dari beberapa pulau yang sebagian besar belum didukung dengan Pelabuhan Penyeberangan, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan mobilitas barang dan jasa antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan.
5. Mengupayakan koordinasi yang maksimal dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui direktorat dan unit pengelola terkait dalam rangka dukungan sumber daya baik berupa anggaran maupun sarana dan prasarana terutama Penyediaan Alat Uji Kendaraan Bermotor sebagai upaya pencapaian kinerja sasaran diluar kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Mengoptialkan penggunaan anggaran secara efektif pada pelaksanaa program dan kegiatan yang menunjang pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan.

7. Perlu adanya perbaikan terkait penentuan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai. Indikator kinerja yang ditetapkan harusnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pemerintah daerah pada urusan perhubungan sehingga pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dapat dimaksimalkan pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang direncanakan.
8. Perlu adanya dukungan dari semua pihak terutama legislatif dalam hal pengalokasian anggaran dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah terkait peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, pencapaian dan evaluasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi digital dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat.